

**LAPORAN KEUANGAN UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA
ANGGARAN BA.018
SEMESTER II TAHUN ANGGARAN 2021**

Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Mamuju
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2021



Jl. H. Abd. Malik Pattana Endeng KM.1, Kec. Simboro, Kab. Mamuju, Sulawesi Barat

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Mamuju adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Mamuju mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Mamuju. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Mamuju, 31 Desember 2021
Kepala Satker,

Agus Karyono
NIP. 19770828 200912 1 002

Kata Pengantar

Daftar Isi

Pernyataan Tanggung Jawab

Ringkasan

I. Laporan Realisasi Anggaran

II. Neraca

III. Laporan Operasional

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

B.1. Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.2. Belanja

B.3. Belanja Pegawai

B.4. Belanja Barang

B.5. Belanja Modal

B.5.1. Belanja Modal Tanah

B.5.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.5.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

C.1. Aset Lancar

C.1.1. Persediaan

C.2. Aset Tetap

C.2.1. Tanah

C.2.2. Peralatan dan Mesin

C.2.3. Gedung dan Bangunan

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.2.5. Konstruksi Dalam Pengerjaan

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

C.3. Aset Lainnya

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

C.5. Ekuitas

C.5.1. Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

D.2. Beban Pegawai

D.3. Beban Persediaan

D.4. Beban Barang dan Jasa

D.5. Beban Pemeliharaan

D.6. Beban Perjalanan Dinas

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

E.2. Surplus/Defisit-LO

- E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar
 - E.3.1. Koreksi Nilai Persediaan
 - E.3.2. Selisih Revaluasi Aset Tetap
 - E.3.3. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi
- E.4. Transaksi Antar Entitas
 - E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)
 - E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar
- E.5. Kenaikan/Penurunan Ekuitas
- E.5. Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan-pengungkapan Lainnya
 - F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca
 - F.2. Pengungkapan Lain-lain

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Mamuju yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Mamuju, 31 Desember 2021
Kepala Satker,

Agus Karyono
NIP. 19770828 200912 1 002

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Mamuju Tahun 2021 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

I. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.081.638.433,00 atau mencapai 103,71% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.042.900.000,00

Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 adalah sebesar Rp8.879.939.419,00 atau mencapai 99,83% dari alokasi anggaran sebesar Rp8.895.166.000,00

II. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021.

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp37.411.155.162,00 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp352.562.595,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp37.058.592.567,00; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp0,00.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp16.832.173,00 dan Rp37.394.322.989,00.

III. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.081.638.433,00, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp8.519.160.891,00 sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai Rp-7.437.522.458,00. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Defisit Rp-22.617,00 dan Defisit Rp0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp-7.437.545.075,00.

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2021 adalah sebesar Rp36.985.664.463,00 ditambah Defisit-LO sebesar Rp-7.437.545.075,00 kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp2.002.615,00 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp7.844.200.986,00 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp37.394.322.989,00.

V. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS II MAMUJU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERKAHIR 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020**

Uraian	Catatan	31 Desember 2021			31 Desember 2020
		Anggaran	Realisasi	%.	Realisasi
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.	1.042.900.000,00	1.081.638.433,00	103,71	1.034.566.466,00
Jumlah Pendapatan		1.042.900.000,00	1.081.638.433,00	103,71	1.034.566.466,00
BELANJA					
Belanja Pegawai	B.3.	2.387.307.000,00	2.384.816.398,00	99,90	2.020.989.096,00
Belanja Barang	B.4.	5.135.707.000,00	5.124.140.661,00	99,77	3.975.455.131,00
Belanja Modal	B.5.	1.372.152.000,00	1.370.982.360,00	99,91	2.469.136.200,00
Jumlah Belanja		8.895.166.000,00	8.879.939.419,00	99,83	8.465.580.427,00

II. NERACA

**STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS II MAMUJU
NERACA
PER 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020**

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET			
Aset Lancar			
Persediaan	C.1.1.	352.562.595,00	304.499.021,00
Jumlah Aset Lancar		352.562.595,00	304.499.021,00
Aset Tetap			
Tanah	C.2.1.	20.652.474.500,00	20.602.562.000,00
Peralatan dan Mesin	C.2.2.	7.071.230.128,00	6.847.669.028,00
Gedung dan Bangunan	C.2.3.	14.942.943.360,00	13.769.534.600,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	C.2.4.	2.043.867.238,00	2.043.867.238,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.2.5.	0,00	30.000.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2.6.	-7.651.922.659,00	-6.596.499.655,00
Jumlah Aset Tetap		37.058.592.567,00	36.697.133.211,00
Jumlah Aset		37.411.155.162,00	37.001.632.232,00
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.4.1.	16.832.173,00	15.967.769,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		16.832.173,00	15.967.769,00
Jumlah Kewajiban		16.832.173,00	15.967.769,00
Ekuitas			
Ekuitas	C.5.	37.394.322.989,00	36.985.664.463,00
Jumlah Ekuitas		37.394.322.989,00	36.985.664.463,00
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		37.411.155.162,00	37.001.632.232,00

III. LAPORAN OPERASIONAL

STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS II MAMUJU
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.	1.081.638.433,00	1.034.566.231,00
JUMLAH PENDAPATAN		1.081.638.433,00	1.034.566.231,00
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2.	2.384.816.398,00	2.020.989.096,00
Beban Persediaan	D.3.	167.997.239,00	328.671.237,00
Beban Barang dan Jasa	D.4.	1.899.846.668,00	1.860.242.577,00
Beban Pemeliharaan	D.5.	725.133.689,00	602.794.260,00
Beban Perjalanan Dinas	D.6.	2.285.943.893,00	1.135.926.949,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7.	1.055.423.004,00	1.052.891.692,00
JUMLAH BEBAN		8.519.160.891,00	7.001.515.811,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		-7.437.522.458,00	-5.966.949.580,00
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8.	0,00	9.945.835,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8.	22.617,00	33.032.847,00
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-22.617,00	-23.087.012,00
SURPLUS/DEFISIT - LO		-7.437.545.075,00	-5.990.036.592,00

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**STASIUN KARANTINA PERTANIAN KELAS II MAMUJU
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 dan 31 DESEMBER 2020**

Uraian	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
EKUITAS AWAL	E.1.	36.985.664.463,00	35.575.411.567,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	E.2.	-7.437.545.075,00	-5.990.036.592,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	E.3.	2.002.615,00	-73.194.223,00
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1.	2.002.615,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E.3.2.	0,00	-61.672.000,00
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	E.3.3.	0,00	-11.522.223,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4.	7.844.200.986,00	7.473.483.711,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.5.	408.658.526,00	1.410.252.896,00
EKUITAS AKHIR	E.6.	37.394.322.989,00	36.985.664.463,00

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Mamuju

Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Mamuju merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Pertanian yang berlokasi di Sulawesi Barat. Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Mamuju didirikan sebagai salah satu upaya Kementerian Pertanian dalam hal ini Badan Karantina Pertanian untuk mencapai visi “Menjadi Fasilitator dan Pelayan Masyarakat yang Profesional, Tangguh dan Terpercaya dalam Penyelenggaraan Karantina di Provinsi Sulawesi Barat”

Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Mamuju dipimpin oleh Pejabat Struktural yaitu Kepala Stasiun yang langsung membawahi Kelompok Jabatan Fungsional, sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Pertanian.

Dalam melaksanakan tugas, Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Mamuju mempunyai tugas pokok, antara lain; Mencegah masuknya hama dan penyakit hewan dan tumbuhan karantina dari luar negeri ke dalam wilayah Negara RI, Mencegah tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina ke area lain di dalam wilayah Negara RI dan Mencegah keluarnya hama dan penyakit hewan karantina dari wilayah Negara RI.

Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Mamuju saat ini memiliki wilayah kerja yang terdiri dari Wilayah Kerja (Wiker) Pelabuhan Laut Pasangkayu, Wilker Pelabuhan Laut Belang-Belang, Wilker Pelabuhan Laut Mamuju, Wilker Bandar Udara Tampapadang, Wilker Pelabuhan Laut Majene dan Polewali Mandar dan Wilker Kantor Pos.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Mamuju. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemendan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.3. Basis Akuntansi

Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Mamuju menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan

peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Mamuju dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Mamuju yang merupakan entitas pelaporan dari Kementerian Pertanian. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Mamuju adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

- Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
 - Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.
- b. Aset Tetap**
- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
 - Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan No.01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana diubah dengan PMK 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun

Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 tahun
Jakan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA, Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor:620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa aset tak berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	04
Franchise	05
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Ekonomi atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Mamuju telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	Anggaran Awal	Anggaran Setal Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Kesehatan, Perlindungan Sosial, Dan Keagamaan	788.400.000,00	788.400.000,00
Pendapatan Jasa Lainnya	254.500.000,00	254.500.000,00
Jumlah Pendapatan	1.042.900.000,00	1.042.900.000,00
Belanja		
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.631.203.000,00	1.959.452.000,00
Belanja Lembur	390.918.000,00	427.855.000,00
Belanja Barang Operasional	1.187.682.000,00	1.226.300.000,00
Belanja Barang Non Operasional	251.580.000,00	264.055.000,00
Belanja Barang Persediaan	296.580.000,00	214.084.000,00
Belanja Jasa	553.626.000,00	412.976.000,00
Belanja Pemeliharaan	587.379.000,00	725.342.000,00
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	1.831.330.000,00	2.292.950.000,00
Belanja Modal Tanah	50.000.000,00	50.000.000,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	161.480.000,00	177.900.000,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.570.672.000,00	1.144.252.000,00
Jumlah Belanja	8.512.450.000,00	8.895.166.000,00

B.1. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp1.081.638.433,00 atau mencapai 103,71% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.042.900.000,00. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Pendapatan			
Pendapatan Denda	0,00	3.149.971,00	0,00
Pendapatan Jasa Lainnya	254.500.000,00	297.598.000,00	116,93

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Pendapatan			
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	788.400.000,00	780.890.462,00	99,05
Jumlah	1.042.900.000,00	1.081.638.433,00	103,71

Realisasi Pendapatan TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 4,55% dibandingkan TA 2020. Rincian perbandingan realisasi pendapatan pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Mamuju adalah sebagai berikut:

Perbandingan Realisasi Pendapatan
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	.%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0,00	185.625,00	- 100,00
Pendapatan Denda	3.149.971,00	6.250.000,00	-49,60
Pendapatan Jasa Lainnya	297.598.000,00	211.153.200,00	40,94
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	780.890.462,00	816.977.406,00	-4,42
Pendapatan Lain-Lain	0,00	235,00	- 100,00
Jumlah	1.081.638.433,00	1.034.566.466,00	4,55

B.2 BELANJA

Realisasi Belanja pada TA 2021 adalah sebesar Rp8.879.939.419,00 atau 99,83% dari anggaran belanja sebesar Rp8.895.166.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Pagu dan Realisasi Belanja per
31 Desember 2021

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	.%
Akun Belanja			
Belanja Pegawai	2.387.307.000,00	2.385.916.606,00	99,94
Belanja Barang	5.135.707.000,00	5.124.140.661,00	99,77
Belanja Modal	1.372.152.000,00	1.370.982.360,00	99,91
Total Belanja Kotor	8.895.166.000,00	8.881.039.627,00	99,84
Pengembalian Belanja		-1.100.208,00	0,00
Total Belanja	8.895.166.000,00	8.879.939.419,00	99,83

Dibandingkan dengan Tahun 2020, Realisasi Belanja TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 4,89% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Anggaran tahun 2021 meningkat dibanding tahun sebelumnya, dimana anggaran di DIPA 2021 sebesar Rp8.895.166.000,00 sedangkan di DIPA 2020 yaitu sebesar Rp8.466.924.000,00. Kenaikan anggaran terletak pada belanja pegawai dan belanja barang.

Perbandingan Realisasi Belanja
31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	.%
Belanja Pegawai	2.384.816.398,00	2.020.989.096,00	18,00
Belanja Barang	5.124.140.661,00	3.975.455.131,00	28,89
Belanja Modal	1.370.982.360,00	2.469.136.200,00	-44,48
Total Belanja	8.879.939.419,00	8.465.580.427,00	4,89

B.3. BELANJA PEGAWAI

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.384.816.398,00 dan Rp2.020.989.096,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi belanja TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 18,00% dari TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Anggaran untuk belanja pegawai meningkat dari Rp2.022.121.000 menjadi Rp2.387.307.000, didasari dengan adanya penambahan pegawai yang dulunya hanya 28 menjadi 33. Penambahan pegawai diperoleh dari pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil dan mutasi pegawai sehingga secara langsung mempengaruhi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
2. Terdapat beberapa pegawai yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional, Pegawai yang menikah dan pegawai yang memiliki penambahan anak, yang secara langsung mempengaruhi penambahan Belanja Gaji dan Tunjangan PNS.

Perbandingan Belanja Pegawai
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.958.074.606,00	1.602.428.228,00	22,19
Belanja Lembur	427.842.000,00	419.641.000,00	1,95

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Jumlah Belanja Kotor	2.385.916.606,00	2.022.069.228,00	17,99
Pengembalian Belanja Pegawai	-1.100.208,00	-1.080.132,00	1,86
Jumlah Belanja	2.384.816.398,00	2.020.989.096,00	18,00

B.4. BELANJA BARANG

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp5.124.140.661,00 dan Rp3.975.455.131,00. Realisasi belanja barang TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 28,89% dari TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Adanya Kegiatan Strategis yang dilaksanakan oleh Stasiun Karantina Pertanian Mamuju yaitu Bimbingan Teknis Akselerasi Ekspor di sejumlah Kabupaten yang mempengaruhi kenaikan Belanja Perjalanan Dalam Negeri dan belanja barang non operasional (belanja bahan).
2. Bertambahnya jumlah pegawai di tahun 2021 juga turut andil dalam menambah Belanja Barang Operasional
3. Adanya perbaikan sejumlah Gedung dan fasilitas kantor yang rusak pasca gempa sehingga mempengaruhi naiknya biaya Pemeliharaan
4. Kasus Covid-19 yang berangsur-angsur membaik hingga akhir tahun 2021 dan diwajibkannya vaksinasi Covid-19 bagi PNS mengakibatkan kembali dilakukannya kegiatan pertemuan secara luring, baik di eselon I maupun Kementerian yang diikuti oleh pegawai Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Mamuju. Hal tersebut juga berpengaruh atas kenaikan Belanja Perjalanan Dalam Negeri.

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	1.226.227.935,00	1.220.665.724,00	0,46
Belanja Barang Non Operasional	263.721.954,00	201.324.072,00	30,99
Belanja Barang Persediaan	214.080.815,00	372.586.241,00	-42,54
Belanja Jasa	409.032.375,00	442.157.885,00	-7,49
Belanja Pemeliharaan	725.133.689,00	602.794.260,00	20,30
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.285.943.893,00	1.135.926.949,00	101,24
Jumlah Belanja Kotor	5.124.140.661,00	3.975.455.131,00	28,89
Pengembalian Belanja Barang	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	5.124.140.661,00	3.975.455.131,00	28,89

B.5. BELANJA MODAL

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.370.982.360,00 dan Rp2.469.136.200,00. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi belanja modal pada TA 2021 mengalami penurunan sebesar -44,48% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Anggaran untuk belanja modal di DIPA tahun 2021 turun dari Rp2.469.168.000 menjadi Rp1.372.152.000, terutama untuk Belanja Modal Peralatan dan Mesin serta Gedung dan Bangunan.

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik/(Turun) %
Belanja Modal Tanah	49.912.500,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	177.661.100,00	1.163.538.600,00	-84,73
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.143.408.760,00	1.305.597.600,00	-12,42
Jumlah Belanja Kotor	1.370.982.360,00	2.469.136.200,00	-44,48
Pengembalian Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	1.370.982.360,00	2.469.136.200,00	-44,48

B.5.1. BELANJA MODAL TANAH

Realisasi Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp49.912.500,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 0,00% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Tidak ada belanja modal untuk Tanah di tahun 2021. Hanya ada pengembangan nilai asset sebesar Rp49.912.500,00 yang berasal dari pengurangan tanah untuk jalan ke rumah jaga Jl RE Martadinata, dengan volume 500 M3

Perbandingan Belanja Modal Tanah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Tanah	49.912.500,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja Kotor	49.912.500,00	0,00	0,00
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	49.912.500,00	0,00	0,00

B.5.2. BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp177.661.100,00 dan Rp1.163.538.600,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2021 mengalami penurunan sebesar -84,73% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Tahun 2021 berkurang dibanding tahun sebelumnya. Tahun 2020 terdapat pembelian barang berupa Mobil, Sepeda Motor, Unit Mesin Absensi, sejumlah Meubelair, AC Split, Televisi, Sound System, Dispenser, Camera Digital dan Kamera Udara/Drone, Microscope dengan Camera, Personal Computer (PC), Laptop dan Printer, Springbed, Batch Laboratory Centrifuge, serta Telephone PABX. Sedangkan untuk Tahun 2021 belanja Peralatan dan Mesin hanya berupa beberapa unit PC, Printer, AC Split, dan Mesin Scanner, Lemari Arsip, Spring Bed, Kulkas, Sofa, Thermal Scanner, Web Cam dan Server Backup.

Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	177.661.100,00	1.163.538.600,00	-84,73
Jumlah Belanja Kotor	177.661.100,00	1.163.538.600,00	-84,73
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	177.661.100,00	1.163.538.600,00	-84,73

B.5.3. BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.143.408.760,00 dan Rp1.305.597.600,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2021 mengalami penurunan sebesar -12,42% dibandingkan TA 2020. Hal ini disebabkan antara lain oleh

1. Belanja Gedung dan Bangunan untuk Tahun 2021 lebih sedikit dari Tahun sebelumnya. Tahun 2020 terdapat pembangunan Parkir Terbuka Permanen dan Talud atau Kerangka Dasar Kadastral Orde 2. Sedangkan untuk Tahun 2021 hanya ada Rehab/Renovasi Gedung yang rusak pasca gempa yaitu Rehab Rumah Jaga, Gedung Lab IKH, Pagar IKH dan Rehab Gedung Kantor WIiker Pelut Mamuju.

Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.143.408.760,00	1.305.597.600,00	-12,42
Jumlah Belanja Kotor	1.143.408.760,00	1.305.597.600,00	-12,42
Pengembalian Belanja	0,00	0,00	0,00
Jumlah Belanja	1.143.408.760,00	1.305.597.600,00	-12,42

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

C.1.1. Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp352.562.595,00 dan Rp304.499.021,00. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Persediaan
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Barang Konsumsi	352.562.595,00	304.499.021,00
Jumlah	352.562.595,00	304.499.021,00

C.2. ASET TETAP

C.2.1. Tanah

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Mamuju per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp20.652.474.500,00 dan Rp20.602.562.000,00. Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	20.602.562.000,00
Mutasi Tambah	
Pengembangan Nilai Aset	49.912.500,00
Saldo per 31 Desember 2021	20.652.474.500,00

Mutasi transaksi penambahan tanah adalah berupa: Pengembangan nilai aset sebesar Rp49.912.500,00 yang berasal dari pengurangan tanah untuk jalan ke rumah jaga Jl. RE Martadinata, dengan volume 500 M32.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Mamuju per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp7.071.230.128,00 dan Rp6.847.669.028,00. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	6.847.669.028,00
Mutasi Tambah	
Pembelian	177.661.100,00
Transfer Masuk	45.900.000,00
Saldo per 31 Desember 2021	7.071.230.128,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	-5.566.580.317,00
Nilai Buku per 31 Desember 2021	1.504.649.811,00

Mutasi transaksi penambahan dan pengurangan peralatan dan mesin adalah berupa:

1. Pembelian Barang berupa 5 Buah P.C. Unit, 1 Unit Printer, 1 Unit Scanner A3, 3 Unit A.C. Split, 3 Unit Scanner Scansnap, 3 Unit Mesin Absensi, 1 Unit Web Camera (Camera Conference), 3 Unit Springbed, 1 Unit Sofa Tamu, 1 Unit Lemari Arsip, 3 Unit Lemari Es, 1 Unit Termogan dan Server Backup.
2. Transfer Masuk 2 Unit Personal Computer (PC).

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Gedung dan Bangunan yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Mamuju per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp14.942.943.360,00 dan Rp13.769.534.600,00. Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	13.769.534.600,00
Mutasi Tambah	
Pengembangan Melalui KDP	1.173.408.760,00
Saldo per 31 Desember 2021	14.942.943.360,00
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	-1.246.694.652,00
Nilai Buku per 31 Desember 2021	13.696.248.708,00

Mutasi transaksi penambahan Gedung dan Bangunan adalah berupa: Belanja Penambahan Nilai Berupa Rehab Rumah Jaga, Rehab Gedung Laboratorium IKH , Rehab Pagar IKH dan Rehab Gedung Kantor Wilker Pelabuhan Laut Mamuju

C.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Mamuju per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.043.867.238,00 dan Rp2.043.867.238,00.

C.2.5. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Nilai Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Mamuju per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp30.000.000,00. yang merupakan pembangunan

gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Rincian lebih lanjut dari Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Mamuju per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp-7.651.922.659,00 dan Rp-6.596.499.655,00.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1.	Peralatan dan Mesin	7.071.230.128,00	-5.566.580.317,00	1.504.649.811,00
2.	Gedung dan Bangunan	14.942.943.360,00	-1.246.694.652,00	13.696.248.708,00
3.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.043.867.238,00	-838.647.690,00	1.205.219.548,00
Akumulasi Penyusutan		24.058.040.726,00	-7.651.922.659,00	16.406.118.067,00

C.4. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp16.832.173,00 dan Rp15.967.769,00. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Adapun rincian Utang kepada Pihak Ketiga pada Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Mamuju per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Perbandingan Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	16.832.173,00	15.967.769,00
Jumlah	16.832.173,00	15.967.769,00

C.5. EKUITAS

C.5. Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp37.394.322.989,00 dan Rp36.985.664.463,00. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.081.638.433,00 dan Rp1.034.566.231,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan PNBPN Lainnya
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	3.149.971,00	6.250.000,00	-49,60
Pendapatan Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan	780.890.462,00	816.977.406,00	-4,42
Pendapatan Jasa Lainnya	297.598.000,00	211.153.200,00	40,94
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0,00	185.625,00	-100,00
Jumlah	1.081.638.433,00	1.034.566.231,00	4,55

Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah turun 49,60%. Denda keterlambatan tahun 2021 berupa Keterlambatan atas Rehab Gedung Kantor Wilker Pelabuhan Laut Mamuju dan denda keterlambatan atas Jasa Konsultan Perencana dan Pengawas Rehab Pagar IKH.

Pendapatan atas Jasa Karantina Pertanian dan Peternakan turun sebesar 4,42% disebabkan karena belum beroperasinya Pelabuhan Laut Mamuju pasca gempa yang merupakan salah satu pintu pemasukan dan pengeluaran yang menyumbang PNBPN terbanyak setelah Wilker Pasangkayu.

Pendapatan Jasa Lainnya meningkat 40,94% dibanding Tahun 2020. Pendapat tersebut merupakan pendapatan yang diperoleh dari Tindakan Karantina Tumbuhan atas Ekspor Produk Sawit dan Turunannya di Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Pasangkayu yang volumenya meningkat di tahun 2021, serta Tindakan Karantina Hewan yang dilakukan di Wilayah Kerja Pelabuhan Laut Majene.

D.2. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.384.816.398,00 dan Rp2.020.989.096,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Beban Pegawai
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	1.324.256.020,00	1.104.725.420,00	19,87
Beban Pembulatan Gaji PNS	26.390,00	23.948,00	10,20
Beban Tunj. Anak PNS	23.066.362,00	15.885.042,00	45,21
Beban Tunj. Beras PNS	81.255.240,00	54.387.420,00	49,40
Beban Tunj. Fungsional PNS	193.932.000,00	135.000.000,00	43,65
Beban Tunj. PPh PNS	749.200,00	257.200,00	191,29
Beban Tunj. Struktural PNS	7.220.000,00	11.410.000,00	-36,72
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	87.042.286,00	69.147.066,00	25,88
Beban Tunjangan Umum PNS	18.879.900,00	20.110.000,00	-6,12
Beban Uang Lembur	427.842.000,00	419.641.000,00	1,95
Beban Uang Makan PNS	220.547.000,00	190.402.000,00	15,83
Jumlah	2.384.816.398,00	2.020.989.096,00	18,00

Secara umum Beban Pegawai di Tahun 2021 meningkat 18,00% dibanding tahun sebelumnya karena adanya penambahan Sumber Daya Manusia di Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Mamuju, yaitu adanya mutasi pegawai dari Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo sebanyak 1 orang dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebanyak 4 orang, yang menambah nilai untuk Beban Gaji Pokok, Pembulatan Gaji, Tunjangan Anak, Tunjangan Beras, tunjangan PPh, serta Beban Uang Makan PNS. Meningkatnya Tunjangan Suami/Istri akibat pernikahan baru sejumlah pegawai turut menambah nilai kenaikan atas Beban Pegawai.

Sementara itu, Tunjangan Umum di tahun 2021 justru menurun sebanyak 6,12% karena ada 1 Pegawai yang diangkat menjadi Fungsional Pranata Keuangan APBN dan 2 orang menjadi Analis Pengelola Keuangan APBN, sehingga mengurangi Beban Tunjangan Umum namun menambah Tunjangan Fungsional.

Adanya perubahan Organisasi di lingkup Badan Karantina Pertanian sesuai Permentan 47 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Karantina Pertanian, juga turut berdampak terhadap turunnya Beban Tunjangan Struktural sebanyak 36,72%. Dimana Tahun 2021 hanya ada 1 Pejabat Struktural di Stasiun Karantina Pertanian Kelas II yaitu Kepala UPT, yang membawahi langsung para Pejabat Fungsional.

Disisi lain Beban Uang Lembur naik 1,95% seiring bertambahnya jumlah pegawai di Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Mamuju.

D.3. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp167.997.239,00 dan Rp328.671.237,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi

atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Persediaan
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Persediaan konsumsi	167.997.239,00	328.671.237,00	-48,89
Jumlah	167.997.239,00	328.671.237,00	-48,89

Beban Persediaan Konsumsi Tahun 2021 turun 48,89% Karena Tahun 2021 Belanja Persediaan Konsumsi untuk Belanja Bahan Pemeriksaan Laboratorium Karantina Pertanian kurang dibanding tahun sebelumnya

D.4. Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.899.846.668,00 dan Rp1.860.242.577,00. Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Barang dan Jasa
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Bahan	263.121.954,00	201.324.072,00	30,70
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	600.000,00	0,00	0,00
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	40.321.900,00	19.794.620,00	103,70
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	116.454.000,00	148.520.000,00	-21,59
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	17.057.426,00	0,00	0,00
Beban Jasa Lainnya	70.023.620,00	76.685.000,00	-8,69
Beban Jasa Profesi	89.900.000,00	47.600.000,00	88,87
Beban Keperluan Perkantoran	967.107.735,00	948.769.169,00	1,93
Beban Langganan Air	6.011.004,00	6.267.600,00	-4,09
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	325.000,00	1.278.308,00	-74,58
Beban Langganan Listrik	147.218.648,00	189.931.564,00	-22,49
Beban Langganan Telepon	65.261.081,00	59.055.309,00	10,51

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	95.034.500,00	95.030.570,00	0,00
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	7.309.800,00	8.551.365,00	-14,52
Beban Sewa	14.100.000,00	57.435.000,00	-75,45
Jumlah	1.899.846.668,00	1.860.242.577,00	2,13

Secara umum Beban Barang dan Jasa naik sebanyak 2,13%. Jika dilihat table diatas, Penambahan tersebut paling dipengaruhi oleh kenaikan Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 yaitu sebanyak 103,70% dibanding tahun sebelumnya. Diketahui bahwa meskipun Pandemi Covid-19 masih terus berlangsung namun kinerja layanan harus terus meningkat sehingga salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengadaan Hand Sanitizer, disinfektan, masker dan vitamin yang diambil dari akun Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID-19. Selain itu ada pula Beban Jasa Penangan Pandemi Covid 19 berupa Biaya Rapid Tes, Swab Antigen PCR, serta Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 berupa pengadaan paket data untuk pertemuan secara virtual.

Beban lain yang juga meningkat signifikan yaitu Beban Jasa Profesi yang naik 88,87% seiring dengan gencarnya kegiatan strategis yang dilaksanakan oleh Stasiun Karantina Pertanian Mamuju yaitu Bimbingan Teknis Akselerasi Ekspor di sejumlah Kabupaten, yang mendatangkan berbagai Narasumber dari luar Kementerian Pertanian.

Disisi lain terjadi penurunan sejumlah Beban akibat Gempa Bumi pada Bulan Januari 2021 yang merusak sejumlah Gedung dan Fasilitas yang dimiliki Stasiun Karantina Pertanian Kelas II Mamuju, termasuk Kantor Wilayah Kerja di Pelabuhan Laut Mamuju dan Instalasi Karantina Hewan, sehingga turut mempengaruhi turunnya Beban Langganan Air, Listrik dan Beban Daya dan Jasa Lainnya, serta Beban Sewa.

Sementara itu adanya beberapa pegawai yang diangkat menjadi Pejabat Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan APBN dan Pranata Keuangan APBN turut mempengaruhi turunnya Beban Honor Operasional Satuan Kerja sebesar 21,59%

Beban Pengiriman Surat Dinas dan Pos Surat juga berkurang sebanyak 62,96% dibanding tahun sebelumnya, karena saat ini Surat menyurat Kedinasan lebih banyak dilakukan secara digital, baik itu melalui email maupun Whatsup.

D.5. Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp725.133.689,00 dan Rp602.794.260,00. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian Beban Pemeliharaan untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Pemeliharaan
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	453.344.000,00	350.984.000,00	29,16
Beban Pemeliharaan Jaringan	54.938.400,00	33.593.232,00	63,54
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	216.851.289,00	218.217.028,00	-0,63
Jumlah	725.133.689,00	602.794.260,00	20,30

Secara umum Beban Pemeliharaan naik 20,30% dibanding tahun sebelumnya, yang terdiri dari Beban atas Pemeliharaan Gedung dan Bangunan yang naik 29,16% akibat kerusakan pasca gempa. Begitu pula Beban Pemeliharaan Jaringan yang naik sebesar 63,54%. Diantaranya pemeliharaan jaringan listrik, telepon dan air di kantor induk dan wilker, serta pembuatan Sumur Bor di Instalasi Karantina Hewan,

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.285.943.893,00 dan Rp1.135.926.949,00. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Perjalanan Dinas
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	1.299.959.981,00	655.763.525,00	98,24
Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	26.550.000,00	-100,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	87.900.000,00	19.650.000,00	347,33
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	190.207.985,00	0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	419.395.204,00	223.758.424,00	87,43
Beban Perjalanan Tetap	288.480.723,00	210.205.000,00	37,24
Jumlah	2.285.943.893,00	1.135.926.949,00	101,24

Beban Perjalanan Dinas naik 101,24% dibanding tahun sebelumnya. Diketahui sejak Maret 2020 hingga pertengahan tahun 2021 pemerintah menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat akibat pandemic Covid-19, sehingga kegiatan perjalanan dinas pegawai baik perjalanan dinas biasa, luar kota maupun dalam kota sempat terhenti. Begitu pula dengan kegiatan pertemuan yang menimbulkan kerumunan orang juga

tidak diperbolehkan. Hal tersebut mengakibatkan turunnya jumlah Beban Perjalanan Dinas Pegawai di tahun 2020 lalu. Namun seiring gencanya vaksinasi dan penerapan gaya hidup New-Normal di era pandemic, maka berangsur-angsur kegiatan pertemuan secara luring kembali bisa dilaksanakan sehingga Beban Perjalanan Dinas Pegawai di tahun 2021 kembali meningkat.

D.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp1.055.423.004,00 dan Rp1.052.891.692,00. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	311.251.291,00	284.679.159,00	9,33
Beban Penyusutan Irigasi	26.062.632,00	26.062.632,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	171.533.490,00	171.533.490,00	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	7.528.254,00	7.528.254,00	0,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	539.047.337,00	563.088.157,00	-4,27
Jumlah	1.055.423.004,00	1.052.891.692,00	0,24

D.8. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	-11.396.847,00	-100,00
Beban Persediaan Rusak/Usang	-22.617,00	-21.636.000,00	-99,90
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0,00	9.945.600,00	-100,00

Uraian	Realisasi 31 Desember 2021	Realisasi 31 Desember 2020	Naik (Turun) %
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0,00	235,00	-100,00
Jumlah	-22.617,00	-23.087.012,00	-99,90

Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 turun 99,90% karena tidak adanya Beban Penyesuaian Nilai Persediaan, Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan, serta tidak adanya Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu. Hanya ada Beban Persediaan Rusak/Usang senilai Rp22.617,00 yaitu berupa 21 Dokumen/Sertifikat yang Rusak/Usang dan telah dimusnahkan pada tanggal 27 Desember 2021 sesuai Berita Acara nomor 1303/PL.320/K.53.E/12/2021.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp36.985.664.463,00 dan Rp35.575.411.567,00.

E.2. Surplus/Defisit-LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp-7.437.545.075,00 dan Rp-5.990.036.592,00. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Saldo Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas Yang Antara Lain Berasal Dari Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.002.615,00 dan Rp-73.194.223,00.

E.3.1. Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp2.002.615,00 dan Rp0,00. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

incian Koreksi Nilai Persediaan per 31 Desember 2021.

Jenis Persediaan	Nilai Koreksi 31 Desember 2021
Barang Konsumsi	2.002.615,00
Jumlah	2.002.615,00

E.3.2. Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp-61.672.000,00.

E.3.3. Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan

Rp-11.522.223,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp7.844.200.986,00 dan Rp7.473.483.711,00. Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rincian Transaksi Antar Entitas per 31 Desember 2021.

Jenis Koreksi	Nilai Koreksi 31 Desember 2021
Ditagihkan ke Entitas Lain	8.879.939.419,00
Diterima dari Entitas Lain	-1.081.638.433,00
Transfer Masuk	45.900.000,00
Jumlah	7.844.200.986,00

E.4.1. Diterima Dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode sampai dengan 31 Desember 2021 saldo DDEL adalah sebesar Rp-1.081.638.433,00 sedangkan DKEL sebesar Rp8.879.939.419,00.

E.4.2. Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp45.900.000,00 yang terdiri dari:

Rincian Transfer Masuk per 31 Desember 2021.

No	Jenis	Entitas Asal	Nilai
1.	Peralatan dan Mesin	018120199412110000KP	45.900.000,00
Jumlah			45.900.000,00

E.5. Ekuitas Akhir

Saldo Ekuitas Akhir untuk periode 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp408.658.526,00 dan Rp1.410.252.896,00.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. Kejadian-kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca

NIHIL

F.2. Pengungkapan Lain-lain

Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 tahun 2021 naik sebesar 103,70% dibanding tahun sebelumnya. Diketahui bahwa meskipun Pandemi Covid-19 masih terus berlangsung namun kinerja layanan kepada pengguna jasa harus terus meningkat, sehingga salah satu cara yang dilakukan yaitu dengan melakukan pengadaan Hand Sanitizer, disinfektan, masker dan vitamin yang diambil dari akun Belanja Barang Operasional Penanganan Pandemi COVID-19. Selain itu ada pula Beban Jasa Penangan Pandemi Covid 19 berupa Biaya Rapid Tes, Swab Antigen PCR, serta Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 berupa pengadaan paket data untuk pertemuan secara virtual.